

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Pengertian Persepsi

Adapun pengertian persepsi secara umum adalah pandangan atau pengamatan terhadap suatu objek. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1983: 39) “Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek”. Dari pendapat tersebut persepsi dapat diartikan sebagai kesan-kesan dan penafsiran seseorang terhadap objek tertentu. Sedangkan dilihat dari keseluruhan, persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, yang di dalam prosesnya dilalui dengan adanya pandangan yang berasal dari komponen pengetahuan sehingga akan mempunyai gambaran yang dapat dinyatakan dalam perilaku terhadap objek tertentu.

Menurut Harold J. Leavitt dalam Muslichah Zarkasi (1992: 107) menyatakan bahwa “Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau

pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu”. Sedangkan menurut Irwanto (1996: 71) menyatakan persepsi adalah “Proses diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan antara gejala maupun peristiwa) sampai disadari dan dimengerti”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap lingkungan berdasarkan pada pengamatan, pengetahuan, dan pengalaman. Persepsi berada pada pikiran dan perasaan manusia secara individu sehingga memungkinkan antara orang yang satu dengan yang lain memiliki persepsi yang berbeda walaupun objek yang dikaji sama.

1) Syarat-syarat Mengadakan Persepsi

Seseorang agar dapat mengadakan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsikan: objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor) dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.
- b. Alat indera atau reseptor yaitu merupakan alat guna untuk menerima stimulus disamping harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- c. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi ada syarat yang bersifat fisik atau kealaman, fisiologis, dan psikologis. (Bimo Walgito, 1993: 54)

Menurut pendapat di atas untuk mengadakan suatu persepsi maka dibutuhkan adanya objek yang sedang terjadi, adanya penginderaan dan diperlukan suatu perhatian.

Selain itu, Bimo Walgito menyatakan proses persepsi berlangsung sebagai berikut:

- a. Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses yang bersifat kealaman (fisik).
- b. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses ini merupakan proses fisiologis.
- c. Di otak sebagai susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang terkaji dalam otak ini merupakan proses psikologis. (Bimo Walgito, 1993: 76)

Dari beberapa pendapat para ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah adanya suatu objek tertentu kemudian disalurkan oleh alat indera ke otak dan kemudian otak mengolahnya menjadi suatu persepsi dari apa yang diterima oleh alat inderanya. Selain itu suatu objek dapat pula dipersepsikan secara berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, karena beberapa sebab diantaranya adalah karena memiliki pola berpikir yang berbeda.

Menurut Irwanto (1996: 96-97) “persepsi sangat bersifat psikologis dari pada proses penginderaan saja, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu perhatian yang selektif, ciri-ciri rangsangan serta nilai-nilai dan kebutuhan individu dan pengalaman terdahulu”.

2) Hal-hal yang Mempengaruhi Persepsi

Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1983: 14-15) hal-hal yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Perhatian
Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya secara sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan persepsi.
2. Set
Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Perbedaan set ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi.
3. Kebutuhan
Kebutuhan sesaat maupun pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
4. Sistem nilai
Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pada persepsi seseorang.
5. Ciri Kepribadian
Misalnya A dan B bekerja di suatu kantor. A seseorang yang penakut akan mempersepsikan alasannya sebagai tokoh yang menakutkan sedangkan si B seseorang yang penuh percaya diri menganggap atasannya yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.
6. Gangguan Kejiwaan
Hal ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.

Berdasarkan dengan diketahuinya hal-hal yang mempengaruhi persepsi seseorang, persepsi seseorang sangat menentukan perilaku baik persepsi negatif terhadap suatu objek yang dapat mengakibatkan motivasi yang salah atau kurang tepat bagi seseorang, sebaliknya persepsi yang positif terhadap suatu objek dapat mengakibatkan motivasi yang tepat bagi seseorang.

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Secara garis besar telah diberikan penjelasan mengenai pengertian persepsi, syarat-syarat melakukan persepsi, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi persepsi, maka perlu kiranya diberikan sedikit penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, maka akan timbul berbagai persepsi antara satu orang dengan orang yang lainnya terhadap objek yang sama.

David Krech dan Crutfield sebagaimana dikutip oleh Rakhmat (1994: 55-59) menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:

1. Faktor Fungsional

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau stimulant tetapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulant itu. Faktor-faktor fungsional ini terdiri atas:

- a. Kebutuhan-kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan demikian kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan persepsi.
- b. Kesiapan mental, suasana mental seseorang akan mempengaruhi perbedaan persepsi seseorang.
- c. Suasana emosi, suasana emosi seseorang baik dia dalam keadaan sedih, bahagia, gelisah maupun marah akan berpengaruh pada persepsi.
- d. Latar belakang budaya, latar belakang budaya dimana orang tersebut berada atau berasal, berpengaruh terhadap objek rangsangan.

2. Faktor Struktural

3. Factor structural semata-mata berasal dari sifat stimulant fisik dan dalam system syaraf individu yang meliputi:

- a. Kemampuan berpikir
- b. Daya tangkap duniawi
- c. Saluran daya tangkap yang ada pada manusia.

(Rakhmat, 1994: 55-59)

Persepsi seseorang itu dapat berubah-ubah, misalnya dari baik menjadi buruk dan juga sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor Konsepsi
3. Factor yang berhubungan dengan konsep seseorang tentang diri sendiri. Faktor yang berhubungan dengan tujuan dan dorongan untuk menghasilkan rangsangan. (Ensiklopedi Umum, 1977: 886)

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, umumnya persepsi seseorang dipengaruhi oleh cara belajar, latar belakang budaya, pendidikan, pola pikir, pengalaman masa lalu dan latar belakang dimana orang tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi yangbermacam-macam seperti setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau paham, kurang paham, tidak paham terhadap objek yang diteliti.

2. Pengertian Persepsi Masyarakat

Adapun pengertian masyarakat menurut beberapa ahli adalah menurut Ralp Linton dalam Soerjono Soekanto (2001: 91) mengatakan bahwa “masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu ketentuan sosial dengan batasan-batasan yang telah dirumuskan dengan jelas.

Menurut Selo Soemarjan dalam Soerjono Soekanto (2001: 92), menyatakan bahwa “masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Sedangkan Koentjaraningrat (1990: 146) mengemukakan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat dalam suatu rasa identitas bersama”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat dalam penelitian ini adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam satu lingkungan terhadap suatu objek berdasarkan pada pengamatan, pengetahuan dan pengalaman sehingga memungkinkan antara orang yang satu dengan yang lain memiliki pandangan yang berbeda walaupun objeknya sama.

3. Pengertian Sikap

Pada umumnya bila seseorang dihadapkan pada pertanyaan tentang sikap, maka orang akan menjawabnya dengan opini, keyakinan, perasaan, perilaku atau kesungguhan perilaku yang dapat dilihat dalam kehidupan nyata. Agar pengertian sikap menjadi jelas, maka ada beberapa pendapat para ahli yang dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Menurut Sarlito Sarwono (1984: 20) sikap adalah “kecenderungan atau kesiediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu di mana sikap ini biasa terjadi terhadap benda, situasi,

orang, kelompok, nilai-nilai dan semua hal yang terdapat di sekitar manusia”.

Menurut Thrustone dalam buku Eddy Soewadi Kartawijaya (1996: 23) “sikap adalah menyukai atau menolak suatu objek psikologi”. sedangkan menurut Doob dalam Sarlito Wirawan Sarwono (1999: 23) “sikap adalah tingkah laku balas yang tersembunyi (*implicate response*) yang terjadi langsung setelah ada rangsangan baik secara disadari maupun tidak disadari”.

Menurut Bimo Walgito (1993: 53-54) “sikap itu adalah sesuatu yang tidak dibawa sejak lahir yang berarti individu atau setiap manusia pada baru lahir belum membawa suatu sikap tertentu, maka sikap itu terbentuk dalam perkembangan individu”.

a) Ciri-ciri Sikap

Sikap adalah suatu gejala psikologis yang tidak dapat diobservasi atau diukur secara langsung tetapi keberadaan sikap harus ditarik kesimpulan dari hasil-hasilnya. Sikap merupakan faktor yang ada pada setiap diri manusia yang mendorong dan dapat menimbulkan perubahan dalam perilaku. Untuk membedakan sikap dengan pendorong lainnya maka akan dikemukakan ciri-ciri sikap.

Menurut Bimo Walgito (1993: 53-54) ciri-ciri sikap adalah:

1. Selalu ada hubungan antara individu dengan proses pengenalan atau persepsi terhadap objek tertentu.
2. Sikap dapat tertuju pada suatu objek tetapi dapat pula tertuju pada sekumpulan objek.

3. Sikap dapat berlangsung lama dan sebentar.
4. Sikap dapat mengandung faktor perasaan tertentu, apakah perasaan itu bersifat positif atau bersifat negatif terhadap suatu objek.

Berdasarkan pendapat tersebut maka akan terlihat bahwa subjek sangat berkaitan dengan objek, dimana sikap seseorang tidak dibawa sejak lahir tetapi terbentuk melalui proses pembelajaran dari individu itu sendiri.

b) Komponen Sikap

Mengenai komponen sikap, ada tiga macam komponen yaitu kognisi, afeksi dan konasi, ketiga ranah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Komponen kognisi berhubungan dengan keyakinan (*beliefs*), ide dan konsep;
2. Komponen afeksi yang menyangkut emosional seseorang;
3. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Komponen kognisi berhubungan dengan keyakinan/kepercayaan seseorang mengenai objek sikap. Kepercayaan terhadap sesuatu sebagai objek sikap akan mempengaruhi seseorang, artinya objek sikap dalam hal ini sangat berperan sekali terhadap tugas yang diembannya. Komponen afeksi yang menyangkut emosional banyak ditentukan oleh kepercayaan. Bila seseorang telah memandang negatif terhadap orang lain, maka akan merasa malas dan hasilnya pun sangat tidak sesuai dengan yang harapan. Komponen konasi dalam sikap menunjukkan

kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan sikapnya terhadap orang lain. Bila seseorang merasa tidak suka terhadap orang lain, maka wajar bila orang tersebut enggan menyapa dan berkomunikasi dengan orang tersebut.

Antara komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak itu tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang selaras, saling berhubungan dan berpadu satu sama lainnya menyebabkan dinamika yang cukup kompleks dan dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku individu.

c) Fungsi Sikap

Katz (dalam Azwar, 1995) menyebutkan fungsi sikap ada empat, yaitu:

1. Fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat yang menunjukkan bahwa individu dengan sikapnya berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang diinginkannya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkannya. Dengan demikian, maka individu akan membentuk sikap positif terhadap hal-hal yang dirasakan akan mendatangkan keuntungan dan membentuk sikap negatif terhadap hal-hal yang merugikannya.
2. Fungsi pertahanan ego yang menunjukkan keinginan individu untuk menghindarkan diri serta melindungi dari hal-hal yang mengancam egonya atau apabila ia mengetahui fakta yang tidak menyenangkan, maka sikap dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego yang akan melindunginya dari kepahitan kenyataan tersebut.
3. Fungsi pernyataan nilai, menunjukkan keinginan individu untuk memperoleh kepuasan dalam menyatakan sesuatu nilai yang dianutnya sesuai dengan penilaian pribadi dan konsep dirinya.
4. Fungsi pengetahuan menunjukkan keinginan individu untuk mengekspresikan rasa ingin tahunya, mencari penalaran dan untuk mengorganisasikan pengalamannya.

4. Pengertian Sikap Masyarakat

Menurut Selo Soemarjan dalam Soerjono Soekanto (2001: 92), menyatakan bahwa “masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Sedangkan Koentjaraningrat (1990: 146) mengemukakan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat dalam suatu rasa identitas bersama”.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2001: 91) mengatakan bahwa “masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu ketentuan sosial dengan batasan-batasan yang telah dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat adalah kecenderungan seseorang dalam masyarakat untuk bertingkah laku terhadap suatu objek yang akan menimbulkan perasaan menyukai atau menolak suatu objek dan sikap terbentuk dalam perkembangan individu bukan bawaan dari lahir. Dengan demikian sikap sangat menentukan cara hidup seseorang dalam bermasyarakat.

5. Kebutuhan Manusia

Manusia berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi. Termasuk dalam kebutuhan primer antara lain kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan. Mengapa kebutuhan seperti itu dinamakan primer?. Ditinjau dari sudut pandang etimologi (asal usul kata), kebutuhan primer itu berarti kebutuhan yang pertama kali dibutuhkan oleh manusia demi kelangsungan hidupnya. Primer sendiri berasal dari kata *primus* yang berarti “pertama”. Agar tetap hidup, manusia harus makan, minum, dan berpakaian layak serta harus pula mempunyai tempat tinggal untuk berlindung dari hujan, matahari, dan udara dingin. Akan sulit bagi manusia untuk melaksanakan jati dirinya sebelum kebutuhan primernya terpenuhi. Itulah mengapa kebutuhan primer disebut “kebutuhan alamiah”. Selanjutnya kebutuhan sekunder dan tersier merupakan kebutuhan setelah kebutuhan terpenuhi atau dengan kata lain kebutuhan sekunder dan tersier merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Selain rumah menjadi kebutuhan primer yang harus terpenuhi, rumah juga termasuk ke dalam unsur kebudayaan. Seperti dikemukakan oleh Kluckhohn, dalam buku Soekanto (2001: 71) menurutnya terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dapat dianggap sebagai *cultural universal*, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).

3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tertulis).
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya).
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan).

Berdasarkan penjelasan mengenai penjelasan kebudayaan, bahwa kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami bagaimanaseharusnya manusia bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat.

6. Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah terhadap masyarakat. Sedangkan stimulan diharapkan dapat menjadi starter pada masyarakat agar dapat memicu semangat dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penyaluran berarti suatu proses, penyampaian, pembuatan, cara menyalurkan dan mengalirkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990: 773). Sedangkan menurut Sudijono (2000 :35) penyaluran adalah “proses pendistribusian, pembagian atau pencairan”. Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah

berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. (Permenpera No. 14 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1-2)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya adalah proses pemberian dana dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKKNB) pada masing-masing daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kegiatannya meliputi:

1. Kegiatan pembangunan baru yaitu pemberian dana tunai sebesar Rp. 10.000.000,- per kepala keluarga/ per unit.
2. Kegiatan peningkatan kualitas yaitu pemberian dana tunai sebesar Rp. 5.000.000,- per kepala keluarga/ per unit.
3. Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yaitu pemberian dana tunai sebesar Rp. 4.000.000,-.

a. Tujuan dan Lingkup Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Buku I: Petunjuk Pelaksanaan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (2011: 1-14)

1. Tujuan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

2. Lingkup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Lingkup bantuan stimulan perumahan swadaya ialah sebagaimana disebutkan dalam tujuan di atas, adalah bantuan stimulan untuk:

- a. PB;
- b. PK; dan
- c. pembangunan PSU.

b. Organisasi Pelaksana BSPS

1. Organisasi di Tingkat Pusat

- a. Tim Pembina: terdiri dari Menteri Perumahan Rakyat dan Deputi Bidang Perumahan Swadaya, dengan tugas dan tanggung jawab:
 1. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

- b. Tim Pelaksana: terdiri dari Satuan Kerja (SATKER) Penyedia Perumahan dan Kelompok Kerja (POKJA) Pusat, yang berkedudukan di Kementerian Perumahan Rakyat.

Tugas dan tanggung jawab SATKER Penyedia Perumahan:

1. Melaksanakan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.
2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran administrasi dan keuangan.

Tugas dan tanggung jawab POKJA pusat:

1. Menyusun panduan tentang dasar-dasar perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya.
2. Melakukan koordinasi dan klarifikasi mengenai kegiatan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya, serta merekomendasikan hasil klarifikasi tersebut, baik kepada satuan kerja maupun instansi terkait.
3. Menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya kepada Menteri Perumahan Rakyat melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya.

Konsultan Manajemen Pusat (KMP), dengan tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan koordinasi dengan Satker Penyediaan Perumahan dan KMW.
2. Menginventarisir data MBR penerima bantuan stimulan.
3. Mengusulkan pola penanganan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya.

2. Organisasi di Tingkat Provinsi

1. Pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur, dengan tugas dan tanggung jawab: mengusulkan POKJA (Kelompok Kerja) provinsi untuk pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya kepada Kementerian Perumahan Rakyat.
2. POKJA provinsi terdiri dari berbagai unsur instansi terkait di Bidang Perumahan. Struktur POKJA provinsi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dengan tugas dan tanggung jawab:
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberian BPS di kabupaten/kota.
 2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan konsultan pendamping yang bertugas di wilayah kabupaten/kota.

3. Mendorong terciptanya harmonisasi di lapangan, menyangkut pelaksanaan kegiatan BSPS.
4. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi antara instansi penanggungjawab kegiatan yang mendukung dengan tim KMW.
5. Memberikan arahan kepada pemerintah kabupaten/kota dan KMW yang ada di wilayah kerjanya.
6. Menyampaikan laporan bulanan Kegiatan BSPS kepada Menteri Perumahan Rakyat melalui Kepala Pusat Pengembangan Perumahan.

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dengan tugas dan tanggung jawab:

1. Berkoordinasi dengan POKJA provinsi dan POKJA kabupaten/kota, dan dalam masalah fungsional KMW berkoordinasi dengan KMP.
2. Mengupayakan ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas pelaksanaan, ketepatan dan kualitas output kegiatan di wilayah kerjanya.
3. Mengupayakan ketepatan sasaran MBR penerima.
4. Mendorong kesiapan LKM/LKNB dalam pelaksanaan kegiatan BSPS bagi MBR.

5. Melakukan supervisi dan monitoring ke lokasi sasaran secara berkala.
6. Menyusun laporan berkala sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak.

3. Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota, dengan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Merekomendasikan lokasi dan LKM/LKNB penyalur pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya kepada Menteri Perumahan Rakyat.
 - b. Mengusulkan POKJA kabupaten/kota kepada Kementerian Perumahan Rakyat.
2. POKJA kabupaten/kota terdiri dari berbagai unsur instansi terkait di bidang perumahan. Struktur POKJA kabupaten/kota terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dengan tugas dan tanggung jawab:
 1. Mengusulkan lokasi kegiatan dan LKM/LKNB kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Perumahan Rakyat.
 2. Mengupayakan ketepatan sasaran MBR penerima.

3. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung, dengan kegiatan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya.
4. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan BSPS.
5. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan, baik mengenai keuangan maupun fisik.
6. Bersama Pemerintah kabupaten/kota, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan BSPS.

LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) adalah lembaga keuangan yang telah Berbadan Hukum dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali.

Tugas dan tanggung jawab LKM/LKNB:

1. Mengusulkan kelompok MBR calon penerima BSPS kepada POKJA kabupaten/kota.
2. Menyalurkan dana BSPS kepada kelompok MBR yang sudah disetujui oleh POKJA kabupaten.
3. Melakukan koordinasi dalam proses penyusunan proposal MBR.
4. Memberikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan dan penyaluran BSPS kepada POKJA kabupaten/kota dan Satuan Kerja Penyedia Perumahan.

Fasilitator dengan tugas dan tanggung jawab:

1. Mendata MBR dan membentuk KSM untuk diusulkan kepada LKM/LKNB.
2. Membantu MBR dalam pembuatan usulan kegiatan.
3. Memberikan bantuan teknis dan administrasi, serta pengawasan dan pembinaan pada LKM/LKNB.
4. Bersama POKJA kabupaten/kota, membantu melakukan verifikasi MBR yang diprioritaskan dan direkomendasikan untuk mendapat dana bantuan stimulan.
5. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan baik kepada LKM/LKNB maupun MBR.
6. Memberikan laporan perkembangan dan permasalahan yang muncul di lapangan secara berkala, yang diserahkan kepada POKJA kabupaten/kota dan KMW.

c. Mekanisme Pelaksanaan

1. Persiapan

- a) Penetapan lokasi: lokasi kegiatan BSPS adalah untuk perumahan sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota.

Kriteria MBR penerima bantuan:

1. Masyarakat yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
2. Status tanah milik sendiri dan tidak bermasalah.

3. Menempati rumah dengan kategori tidak layak huni untuk PK dan belum memiliki rumah untuk PB.
 4. Bantuan Stimulan untuk PK dan PB diperuntukkan bagi rumah pertama.
 5. Untuk kegiatan PB disarankan lokasi MBR yang menyebar (d disesuaikan dengan kondisi lapangan), sementara kegiatan PK pada wilayah dengan kondisi kepadatan bangunan paling rendah 50 unit per hektar di perkotaan atau antara 30-50 unit di perdesaan.
- b) Fasilitator membantu pembentukan KSM yang beranggotakan 10-25 MBR.
 - c) POKJA melakukan verifikasi terhadap LKM/LKNB untuk diusulkan kepada bupati/walikota.
 - d) Hasil verifikasi LKM/LKNB direkomendasikan oleh bupati/walikota, yang selanjutnya disampaikan kepada POKJA pusat untuk disahkan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

2. Pelaksanaan

- 1) Sosialisasi:
 1. Tingkat Nasional diselenggarakan oleh POKJA pusat dibantu KMP. Pesertanya adalah POKJA provinsi dan KMW.

2. Tingkat provinsi diselenggarakan oleh POKJA provinsi dibantu KMW. Pesertanya adalah POKJA kabupaten/kota, dinas terkait dan korprov.
3. Tingkat kabupaten diselenggarakan oleh POKJA kabupaten/kota dibantu KMW. Pesertanya adalah fasilitator dan LKM/LKNB.
4. Tingkat masyarakat diselenggarakan oleh POKJA kabupaten/kota yang didampingi oleh fasilitator.

2) Persiapan Pencairan Dana

1. KSM menyusun usulan kegiatan MBR dan usulan kegiatan PSU yang disampaikan kepada LKM/LKNB.
2. LKM/LKNB menyusun proposal yang merupakan rekapitulasi usulan kegiatan KSM untuk diverifikasi oleh POKJA kabupaten/kota.
3. Proposal hasil verifikasi disampaikan ke SATKER Penyediaan Perumahan untuk diverifikasi kembali.
4. LKM/LKNB membuat Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan PPK Penyedia Perumahan Swadaya dan Rumah Khusus yang diketahui oleh SATKER Penyedia Perumahan.

3) Pencairan Dana

1. Besaran Dana Stimulan
 - a. PB: Rp. 10.000.000,-.

- b. PK: Rp. 5.000.000,- untuk PSU, dikalikan jumlah unit rumah.
2. SATKER Penyediaan Perumahan membuat SPM kepada KPPN.
3. Pencairan dana melalui transfer dari KPPN ke rekening atas nama LKM/LKNB, untuk disalurkan kepada KSM/MBR.
4. Penyaluran dana stimulan perumahan swadaya dilakukan secara bertahap, yaitu:
 1. Tahap pertama 50% (lima puluh persen), apabila usulan dari masyarakat melalui LKM/LKNB telah memenuhi persyaratan dan disetujui.
 2. Tahap kedua 50% (lima puluh persen) sisanya, apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai minimum 30% (tiga puluh persen)
5. LKM/LKNB harus segeramenyalurkan dana langsung kepada MBR selambat-lambatnya 4 (empat hari kerja setelah dana diterima dalam rekening LKM/LKNB).

3. Administrasi Kegiatan

- a. Untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana stimulan, dibutuhkan pencatatan dalam buku kas harian dengan didukung oleh bukti dan arsip yang terpisah dari kegiatan LKM/LKNB lainnya.

- b. Catatan pada buku kas harian digunakan untuk menyusun laporan bulanan LKM/LKNB yang menyangkut jumlah penerimaan dan pengeluaran uang.
- c. KSM-PSU membuat Buku Material (BM), berupa catatan penerimaan material, catatan penggunaan material dan catatan upah kerja.
- d. Catatan pada BM digunakan untuk menyiapkan laporan realisasi fisik PSU.

4. Pelaporan

- 1) **Laporan Bulanan** yang berisi *progress*, kendala-kendala yang dihadapi serta tindak lanjut kegiatan dalam satu bulan berjalan, disusun oleh:
 - a. LKM/LKNB menyusun dan menyampaikan kepada POKJA kabupaten/kota dan Satker Penyedia Perumahan, dengan dibantu oleh fasilitator.
 - b. POKJA kabupaten/kota yang disampaikan kepada Satker Penyedia Perumahan, dengan tembusan ke POKJA provinsi.
 - c. POKJA provinsi membuat rekapitulasi laporan POKJA kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Satker Penyedia Perumahan.

- d. POKJA pusat membuat rekapitulasi semua laporan POKJA kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri Perumahan Rakyat.

2) Laporan Akhir LKM/LKNB disampaikan kepada Satker Penyedia Perumahan, yang berisi *progress*, kendala-kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya, dengan dilengkapi:

- a. Foto-foto dokumentasi kegiatan PB, PK, dan PSU tahap 0%, 30%, dan 100%. Pengambilan foto dokumentasi 0%, 30%, dan 100% dilakukan dari sudut atau sisi pengambilan yang sama.
- b. Untuk MBR yang melakukan perbaikan terhadap beberapa bagian rumahnya, seperti dinding, lantai, dan atap, dilakukan pengambilan foto dokumentasi terhadap semua objek yang akan diperbaiki. Foto dokumentasi yang diajukan dalam Proposal Termin I cukup 1 (satu) dengan nilai biaya konstruksi yang paling besar.
- c. Penyerahan laporan akhir LKM/LKNB paling lambat pada minggu kedua Desember 2011.

d. Pengawasan , Pengendalian, dan Pengaduan

1. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kebenaran prosedur dan pengendalian mutu, yang dilakukan terhadap administrasi keuangan dan administrasi lainnya, serta teknis bangunan dan lingkungan.
- b. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh POKJA pusat, POKJA provinsi, dan POKJA kabupaten/kota terhadap LKM/LKNN dan MBR, untuk mengetahui perkembangan yang diharapkan.
- c. POKJA kabupaten /kota dan fasilitator melakukan monitoring dan pengawasan penyaluran dana oleh LKM/LKNN dan pemanfaatan dana oleh MBR.
- d. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu diperlukan, dapat dilakukan audit dana stimulan yang disalurkan ke LKM/LKNN.

2. Pengaduan

- a. Masyarakat atau pihak lain dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan kegiatan BSSP.
- b. Hal-hal yang bisa diadukan meliputi penyimpangan prosedur, penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana, kejadian yang mengarah ke kondisi *force majeure* (suatu keadaan yang terjadi

di luar kemampuan manusia, seperti akibat bencana alam, kerusuhan, atau kerusakan massal), berkaitan dengan adanya tindakan negatif yang merugikan masyarakat maupun kepentingan kegiatan lainnya.

c. Prosedur Pengaduan:

1. Jika penyelewengan dilakukan oleh KSM, maka pengaduan ditujukan kepada ketua LKM/LKKNB dan fasilitator.
2. Jika penyelewengan dilakukan oleh LKM/LKKNB, maka pengaduan ditujukan kepada POKJA kabupaten/kota dan fasilitator. Atas pengaduan tersebut, POKJA kabupaten/kota melakukan penyelesaian di daerah, dengan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada POKJA pusat dan SATKER Penyediaan Perumahan, yang ditembuskan kepada POKJA provinsi.
3. Jika laporan penyelewengan LKM/LKKNB tidak bisa diselesaikan oleh POKJA kabupaten/kota, maka POKJA kabupaten/kota meminta POKJA provinsi untuk melakukan penyelesaian, dengan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada POKJA pusat dan SATKER Penyediaan Perumahan.
4. Jika laporan penyelewengan LKM/LKKNB tersebut juga tidak bisa diselesaikan oleh POKJA provinsi, maka penyelesaian akan dilakukan oleh POKJA pusat dan SATKER Penyediaan Perumahan.

d. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menangani pengaduan:

1. Identitas pelapor harus dirahasiakan.

2. Sebelum pengaduan tersebut ditangani, harus dilakukan uji silang untuk mendapatkan kepastian permasalahan.
3. Penanganan harus sesuai dengan cakupan kasusnya, misalnya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur.
4. Penanganan pengaduan harus mempertimbangkan resiko luasan dampak yang akan muncul. Pengaduan yang muncul dan tindak lanjut penanganan, baik yang telah ditangani maupun yang sedang dalam proses penanganan oleh masing-masing jenjang, dilaporkan sebagai kelengkapan dari laporan bulanan yang dilaksanakan secara berjenjang.

B. Kerangka Pikir

Persepsi merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu objek yang dapat berubah-ubah, misalnya dari baik menjadi tidak baik dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: perhatian, lingkungan, sistem nilai, dan kepribadian seseorang. Dari persepsi maka dapat ditindaklanjuti oleh sikap dan perbuatan dimana sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku terhadap suatu objek yang dapat menimbulkan perasaan menyukai atau menolak suatu objek, sikap sangat menentukan cara hidup seseorang dalam bermasyarakat. Dalam rangka membantu mensejahterakan masyarakat yang berpenghasilan rendah maka Kementerian Perumahan Rakyat telah mencanangkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat

berpenghasilan rendah. Agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang berakibat pada sikap yang buruk terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka kerangka pikir tersebut adalah:

